

**REVISI PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2014**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	
1	2	3	4	
MISI 1:				
Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan				
1.	Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	1	Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	95%
		2	Penerapan e-Government yang diukur :	
			- e-Procurement (LPSE)	90%
			- Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi	46 SKPD
			- Jumlah SKPD yang memiliki website	46 SKPD
			- WAN (Wide Area Network) setiap SKPD	60%
			- Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD	100%
		3	Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah:	
			- Buku Daerah dalam Angka	ada
			- Buku PDRB Kota	ada
		4	Tersedianya data base informasi kearsipan	ada
		5	Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku	60%
		6	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	80%
		7	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	70%
2.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan akuntabel	1	Hasil Opini BPK untuk Laporan Keuangan	WDP
		2	Tingkat Ketertiban Administasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan	85%
		3	Tingkat temuan pemeriksaan	85
		4	Tingkat capaian kinerja pemerintah kota:	
			LAKIP	sangat baik
			LPPD	tepat waktu
			LKPJ	tepat waktu
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	memuaskan
		6	Tingkat perbaikan terhadap semua obrik	68%
7	Persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan jabatan struktural	83%		
3.	Diwujudkannnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adil	1	Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum	100%
		2	Penyelesaian aduan masyarakat	100%
		3	Tingkat kompetensi aparatur	91%
		4	Rasio bayi berakte kelahiran	100%
		5	Rasio pasangan berakte nikah	100%
		6	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%
		7	Kepemilikan KTP	100%
		8	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (menyusul)	813
		9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada
		10	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
		11	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100%
		12	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	100%
		13	Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	23%
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	1	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)	6
		2	Tingkat penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat waktu dan tepat asas.	100%
		3	Jumlah Penelitian/ kajian sebagai bahan masukan kebijakan	4
		4	Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada
		5	Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada
		6	Dokumen RKPd yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada
		7	Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	90%
		8	Program dalam BA Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPd	90%
		9	Pelaksanaan Musrenbang	terlaksana
		10	Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah	80%
6.	Terciptanya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)	1	Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah	3
		2	Waktu rata-rata pembahasan Raperda / Perda	6 bulan
		3	Media Informasi Pemda yang dapat diakses publik	3
		4	Frekuensi koordinasi eksekutif dengan legislatif	12
		5	Frekuensi komunikasi Pemda dengan tokoh masyarakat	24
		6	Frekuensi komunikasi Pemda dengan pelaku usaha	12
		7	Raperda yang disetujui DPRD	20
7.	Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua	1	Tingkat penyelesaian permasalahan hukum	100%
		2	Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	5
		3	Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat	5
		4	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	75%
8.	Terwujudnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	1	Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	tepat waktu
		2	Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	sesuai
MISI 2:				
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat				
1.	Terciptanya keterpaduan sumber pendanaan baik	1	Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana	17%
2.	Terkelolanya aset-aset daerah	1	Rasio nilai aset daerah yang dikelola	75%
		2	Rasio nilai aset yang terdata	65%
3.	Terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)/Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR) dan donasi/zakat	1	Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan	2
		2	Jumlah kerjasama dengan swasta	ada
		3	Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	54 bank
		4	Tingkat Perkembangan BUMD	4%
		5	Jumlah inovasi/diversifikasi produk BUMD	7
		6	Nilai kontribusi perusda terhadap PAD	3%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	
1	2	3	4	
4.	Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	1	Jumlah dan macam pajak	10
		2	Jumlah dan macam retribusi Daerah	3
		3	Rasio PAD terhadap APBD	3,35%
5.	Terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal investasi	1	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	3
6.	Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi	1	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	315
		2	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	24.653.522.764
7.	Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah	1	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2
		2	Lama proses perijinan	4
		3	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	pendaftaran izin prinsip, izin usaha, penanaman modal, SIUP, TDP
8.	Terbangunnya kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha	1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	170
		2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	79.793.468.775
		3	Jumlah MOU dalam investasi	2
		4	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1
		5	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada	1
9.	Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota	1	Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	1
10.	Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (Payment for Ecological/Environment Services = imbal jasa lingkungan)	1	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha	1
11.	Terwujudnya identifikasi investasi swasta	1	Nilai investasi swasta	405.000.000.000
		2	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 kawasan
		3	Jenis Investasi Swasta	PMDN
12.	Tersedianya data dan informasi ketenagakerjaan	1	Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17
13.	Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota	1	Perencanaan Manajemen dan operasional BLK	1 dok
14.	Tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja	1	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	31%
		2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100%
		3	Rasio daya serap tenaga kerja	16500
		4	Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17 kel.
		5	Prosentase transmigran yang ditempatkan	4 kk
15.	Tercapainya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,20%
		2	Tingkat pengangguran terbuka	10%
		3	Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)	10%
		4	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	80%
		5	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	70%
		6	Besaran pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	70%
16.	Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	1	Angka sengketa (perselisihan) pengusaha pekerja per tahun	16

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
		2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%
		3	Jumlah SP yang terbentuk di tingkat perusahaan	22 unit
17.	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan	1	Jumlah LKS Bipartit	33 unit
		2	Jumlah masukan LKS Tripartit dalam memberikan pertimbangan ketenagakerjaan kepada pimpinan daerah	4
		3	Besaran pemeriksaan perusahaan	40%
		4	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	20%
18.	Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja	1	Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.	14
19.	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja	1	Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	98,03%
		2	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemda	0%
		3	Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI	2%
20.	Terciptanya wirausaha baru	1	Jumlah wirausaha baru	25
21.	Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja	1	Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan	3,26%
		2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	45%

MISI 3:

Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat

1.	Terwujudnya penambahan pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha)	1	Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang	1300
2.	Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan	1	Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	1150
3.	Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang	1	Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	355
4.	Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan	1	Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	5
		2	Jumlah Paguyupan PKL	5
5.	Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat	1	Adanya regulasi ketahanan pangan	ada
		2	Ketersediaan pangan utama	100%
		3	Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin	5000 RTS-PM
		4	Tingkat kerawanan pangan dan gizi	Tidak ada
		5	Ketersediaan energi dan protein perkapita	
			a. Ketersediaan energi (Kkal/kap/th)	95%
			b. Ketersediaan protein (gr/kap/th)	100%
		6	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	83,50%
		7	Stabilitas harga dan pasokan pangan	87%
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1	Tingkat diversifikasi konsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman	93,70%
		2	Tersedianya database produk pangan lokal	ada
		3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,50%
7.	Terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha	1	Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	250
		2	Persentase UMKMK yang produktif	60%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
8.	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi	1	Prosentase Koperasi Aktif	74%
		2	Jumlah koperasi	216
9.	Terwujudnya perluasan pangsa pasar UMKMK	1	Jumlah promosi UMKMK	13
		2	Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	20
		3	Jumlah industri rumah tangga	2000
		4	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5%
10.	Terwujudnya peningkatan jumlah UMKM dan daya saing usaha	1	Jumlah UMKM, UKM non BPR/LKM UKM	950
		2	Jumlah UMKMK	900
11.	Terwujudnya peningkatan volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKMK	1	Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	380
12.	Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas	1	Rasio petani terlatih	
			a. Pertanian	75%
			b. Peternakan	70%
			c. Perikanan	75%
		2	Cakupan bina kelompok petani	97%
		3	Cakupan bina kelompok peternak	98%
13.	Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis	1	Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	10
14.	Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran	1	Jumlah tempat pengolahan pasca panen:	
			a. Pertanian	4
			b. Peternakan	2
			c. Perikanan	3
		2	Jumlah sentra/pasar/Balai Benih budidaya Pertanian, Peternakan dan perikanan	2
15.	Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis	1	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	100%
16.	Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan	1	Prosentase pemanfaatan lahan	100%
17.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)	1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2,91%
18.	Terwujudnya peningkatan produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas	1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar:	57
			Produksi padi/bahan pangan utama	3.200
			Prod. Jagung	14,5
			Prod. Ketela Pohon	144
		2	Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	9.000
		3	Jumlah produksi peternakan	
			Daging (kg)	3.928.227
			Telur (kg)	371.824
			Susu (l)	437.192
		4	Produksi perikanan kelompok petani	277
		5	Jumlah konsumsi ikan	17.73/16320
		6	Jumlah konsumsi produk peternakan	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
		daging (kg/Kap/th)	15,68
		telor (kg/Kap/th)	2,97
		susu (lt/Kap/th)	2,44
		7 Jumlah produksi peternakan kelompok ternak :	
		Sapi	55
		Domba	13
		unggas	1820
19.	Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet	1 Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	7.121
		2 Jumlah pemeriksaan dan pengawasan lalulintas ternak	12
20.	Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang	1 Penguatan kelembagaan petani	
		a. Pertanian	16
		b. Peternakan	8
		c. Perikanan	17
21.	Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru	1 Jumlah penggunaan benih padi bermutu	5.500
22.	Terwujudnya penurunan serangan OPT	1 Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	100%
23.	Tersedianya benih/bibit berkualitas	1 Jumlah populasi ternak:	
		Unggas	73.217
		Domba / kambing	577
		Sapi	212
		2 Jumlah bibit :	
		Sapi	103
		Kelinci	64
24.	Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan	1 Jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani)	5
25.	Terwujudnya perlindungan hutan	1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	23
		2 Konservasi kawasan hutan	71
		3 Kerusakan kawasan hutan	2

MISI 4:

Meningkatkan pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian

1.	Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL	1 Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 -2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	50%
		2 Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	80%
		3 Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%
		4 Persentase Luas Permukiman yang tertata	80%
		5 Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%
		6 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	45%
		7 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	3,80%
		8 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota	100,00%
		9 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota	ada
		10 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	75%
		11 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	ada

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
		12 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%
		13 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	ada
		14 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%
		15 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%
		16 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	16%
		17 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	59%
		18 Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%
2.	Terwujudnya Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan	1 Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik	85%
		Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	0%
		Proporsi panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik	80%
		2 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	99,20%
		3 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	68,86%
		4 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60,36%
		5 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	80%
		6 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	70%
		7 Data base jalan yang ter update	ada
		8 Rasio kawasan khusus PKL per seluruh kawasan PKL	20%
		9 Proporsi Jumlah Jembatan dengan Kondisi baik	91,00%
		10 Proporsi panjang prasarana pejalan kaki dengan kondisi baik	80%
		11 Rasio Jaringan Irigasi dengan Kondisi Baik	58%
		12 Peningkatan panjang saluran drainase utama dengan kondisi baik	67%
		13 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	83%
		14 Panjang jalan dilalui roda 4	92%
		15 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	92%
		16 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	35%
		17 Sepadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	8%
		18 Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)	100%
		19 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	70%
		20 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	80%
		21 Rasio Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	85%
		22 Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik	90%
		23 Terbangunnya Pasar Rejowinangun	80%
		24 Tersedianya Peraturan Daerah bidang bangunan gedung (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria)	ada

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
		25	Tersedianya data bangunan dan gedung beserta lingkungannya di Kota Magelang yang ter-update	ada
3.	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur perumahan	1	Rasio jumlah rumah layak huni	83%
		2	Tersedianya rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA) dan rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI)	1
		3	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	94%
		4	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	83%
		5	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	89,28%
		6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	92,50%
		7	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	59%
		8	Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	89%
		9	Rumah tangga pengguna air bersih	95%
		10	Rumah tangga pengguna listrik	97%
		11	Rumah tangga bersanitasi	97%
		12	Rumah tangga yang telah memiliki rumah tempat tinggal layak huni	92%
4.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	20,00%
		2	Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon- alon)	90%
		3	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	37%
		4	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	15%
		5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	65%
		6	Penegakan hukum lingkungan hidup	1
		7	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	5%
		8	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	ada
		9	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	ada
		10	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%
		11	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%
		12	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%
		13	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%
		14	Cakupan kunjungan/ patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS	100%
		15	Rasio ketersediaan IPAL	27%
		16	Jumlah penduduk terlayani jaringan persampahan menjadi sebesar 128.820 jiwa (96%), kondisi eksisting 120.849 jiwa	91%
		17	Rasio penanganan sampah perkotaan (pengangkutan)	85%
		18	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
5.	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis	1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar, dan Alun-alun	65%
6.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat	1 Ketersediaan/jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL	85%
		2 Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	80%
		3 Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik	75%
		4 Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	65%
		5 Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	85%
		6 Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	85%
		7 Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang	2218
		8 Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	5%
		9 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30
		10 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	36.000
		11 Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	13
		12 Rasio ijin trayek	0,82%
		13 Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.900.000
		14 Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	2.900.000
		15 Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	2.900.000
		16 Pemasangan rambu-rambu	75%
		17 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	90%
		18 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	90%
		19 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	80%
		20 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	60%
		21 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota	80%
		22 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	90%
		23 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	70%
		24 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	35%
		25 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota	50%
		26 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	50%
		27 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	
1	2	3	4	
7.	Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan	1	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	8
		2	Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	13
		3	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	14
		4	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,0450%
		5	Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	8
		6	Website milik pemerintah daerah	16
		7	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, website, tradisional, interpersonal, luar ruang.	12
		8	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	70% 13
8.	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan	1	Pertumbuhan Jumlah Kunjungan wisata	
			- jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.119.267
			- jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	89
		2	Tingkat hunian hotel dengan:	
			- Rata-rata lama tinggal (mancanegara)	3-5 hari
			- Rata-rata lama tinggal (nusantara)	3-6 hari
3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	8		
9.	Terdatanya lembaga/kelompok seni dan budaya	1	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	164
10.	Terwujudnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya	1	Jumlah festival seni dan budaya.	4
		2	Jumlah gedung kesenian	2
		3	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5
		4	Cakupan kajian seni 50%	40%
		5	Cakupan fasilitas seni 30%	28%
		6	Cakupan gelar seni 75%	70%
		7	Misi kesenian 100%	90%
		8	Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%	23%
		9	Cakupan tempat 100%	50%
		10	Cakupan organisasi 34%	34%
11.	Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya	1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36
		2	Jumlah museum yang dikelola	1
12.	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	65,00%
		2	LPM berprestasi	16,17%
		3	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	96,00%
		4	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100,00%
		5	Terlaksananya BBGRM di 17 kelurahan	55,00%
13.	Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat	1	Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna)	85%
		2	Jumlah Krenova yang terdata	14
14.	Terwujudnya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat	1	Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	65%
15.	Terwujudnya review pokjnal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi	1	Posyandu aktif	100%
		2	Jumlah posyandu yang berprestasi	2,08%
16.	Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis	1	Jumlah rakor dan monev TKPK	7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
17.	Terwujudnya peningkatan kualitas program PNPM	1	Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik	17
18.	Terlaksananya PMTAS	1	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS	400
19.	Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1	Rasio KDRT	0,15%
		2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	63,23%
		3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	44,11%
		4	Persentase tenaga kerja di bawah umur	0
		5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	75%
		6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	76%
		7	PKK Aktif	100%
		8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata-laksana KtP/Adan PPT/PKT di Rumah Sakit	85%
		9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	90%
		10	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	90%
		11	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	70%
		12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	70%
		13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	85%
		14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	85%
		15	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	80%

MISI 5:

Mendorong peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi

1.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%
		2	Rasio dokter persatuan penduduk	0,965
		3	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	1,936
		4	Jumlah tenaga kebidanan yang memiliki kompetensi kebidanan	60%
		5	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%
		6	Jumlah tenaga medis dan non medis sesuai dengan kebutuhan RS dan Puskesmas	
			- Tenaga Medis	1.167
	- Tenaga non medis	162		
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	7	Jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi	1.497
		1	Terbangunnya informasi kesehatan yang terpadu	70%
		2	Posyandu Purnama	53%
		3	Posyandu Mandiri	20%
		4	Cakupan pemeriksaan siswa SD oleh tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil	100%
		5	Cakupan pemeriksaan siswa TK, SLTP, SLTA oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS	80%
		6	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	84%
7	Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk	15%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
		8 Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk	1,50%
		9 Cakupan Puskesmas	100%
		10 Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU)	75%
		11 Jumlah puskesmas santun usila	5
		12 Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan	3%
		13 Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	100%
		14 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%
		15 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	17%
		16 Rasio Rumah sakit persatuan penduduk	8%
		17 Terwujudnya RSUD Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar	100%
		18 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%
3.	Terwujudnya peningkatan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1 Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%
		2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100%
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%
		4 Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90%
		5 Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	100%
		6 Cakupan kunjungan bayi	90%
		7 Cakupan bayi BBLR ditangani	100%
		8 Angka kelangsungan hidup bayi	995,19
		9 Angka usia harapan hidup	70,81
		10 Cakupan pelayanan anak balita.	90%
		11 Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	70%
		12 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%
		13 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
		14 Balita yang datang dan ditimbang (D/S)	95%
		15 Balita yang naik berat badannya (N/D)	60%
		16 Balita Bawah Garis Merah (BGM)	3,50%
		17 Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus	100%
		18 Cakupan Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	100%
		19 Kelurahan dengan garam beryodium baik	100%
		20 Angka kematian bayi	2.86/1000 kh
		21 Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar	100%
		22 Cakupan pemanfaatan buku KIA	95%
		23 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%
4.	Terwujudnya peningkatan gizi masyarakat	1 Cakupan bayi mendapat kapsul vitamin A	100%
		2 Cakupan ibu nifas mendapat kapsul vitamin A	100%
		3 Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	100%
		4 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%
		5 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin	100%
		6 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
		7 Persentase balita gizi buruk	1%
		8 Kecamatan bebas rawan gizi	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
		9 Bayi mendapat Asi Eksklusif	40%
		10 Prosentase Keluarga sadar gizi	85%
5.	Terwujudnya pengurangan kasus penyakit menular	1 Kelurahan KLB yang ditangani <24 jam	100%
		2 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit	
		Acute Flacid Paralisis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	>=2
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%
		Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100%
		Penderita DBD yang Ditangani	100%
		Penemuan Penderita Diare	100%
		3 Kesembuhan penderita TBC BTA (+)	> 85 %
		4 Penemuan kasus TBC BTA (+)-CDR	> 70 %
		5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.	>85%
		6 Klien AIDS yang mendapatkan penanganan HIV AIDS	100%
		7 Kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) yang ditangani	100%
		8 Balita dengan diare yang ditangani	100%
		9 CFR/angka kematian DBD DBD	< 1%
		10 Rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes	> 95 %
		11 API Penyakit Malaria (Angka Kesakitan)	< 1/1000 penduduk per tahun
		12 Prevalens Rate Kusta	< 1/100000 penduduk
		13 RFT Kusta	100%
		14 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%
6.	Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	1 Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%
7.	Terwujudnya peningkatan jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat	1 Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji kewanamanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat	100%
		2 Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (P3 Napza/Narkotika, Psikotropika) dan Bahan berbahaya (P3 Narkoba)	4,50%
		3 Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan	0%
8.	Terwujudnya peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	1 Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan	100%
		2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%
		3 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%
		4 Kepemilikan kartu Jamkesda	80%
		5 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%
		6 Jumlah penduduk miskin dan rentan yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	27.552
9.	Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	1 Cakupan Rumah tangga sehat	98%
		2 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3	100%
10.	Terciptanya lingkungan hidup yang sehat	1 Institusi yang dibina kesehatan lingkungannya	85%
		2 Rumah sehat	88%
		3 Penduduk yang memanfaatkan jamban	89%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
		4 Rumah yang mempunyai SPAL	85%
		5 Sanitasi tempat umum yang memenuhi syarat (dalam kondisi baik)	84%
		6 Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	
		- Penduduk kota Magelang	85,25%
		- Penduduk pengguna air bersih/ air minum	91,50%
		- Pengusaha Industri Air Minum Isi Ulang	94,50%
		- Pengusaha IRT dan Restoran	80,20%
		7 Gerakan Cuci Tangan pakai sabun pada murid SD	95%
		8 Pengawasan Lingkungan	
		- Industri Rumah Tangga	55%
		- RS, Puskesmas, Klinik	88%
		9 Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)	80,30%
11.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera	1 Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,21
		2 Rasio akseptor KB	90%
		3 Cakupan peserta KB aktif	87%
		4 Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	80%
		5 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%	3,50%
		6 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	65%
		7 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	5%
		8 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	70%
		9 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	87%
		10 Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga berencana (PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%
		11 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100%
		12 Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%
		13 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%
		14 Presentase pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani KB (unmet-need)	5%
		15 Partisipasi laki-laki dalam ber-KB	13%
		16 Presentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri	75%
		17 Presentase peserta KB yang putus pakai (drop out)	7%
		18 Prosentase perempuan yang menikah di bawah 20 tahun	3%
		19 Prosentase keluarga yang mempunyai balita dan ikut dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	30%
		20 Prosentase keluarga yang mempunyai remaja dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga remaja (BKR)	20%
		21 Prosentase kelurahan yang mempunyai kelompok BKL aktif	100%
		22 Prosentase Kelurahan yang mempunyai kelompok UPPKS aktif	100%
		23 Prosentase Kehamilan pada ibu yang berumur kurang dari 20 Tahun	2%
		24 Prosentase kehamilan pada ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun	2%
		25 Prosentase kehamilan pada ibu yang berumur lebih dari 35 tahun	1%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
		26	Prosentase wilayah RT, yang mempunyai data mikro	100%
		27	Prosentase Kelurahan yang memanfaatkan data mikro keluarga	100%
		28	Prosentase Institusi masyarakat pengelola program KB yang aktif di kelurahan	95%
12.	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1	Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi)	13
		2	Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%
		3	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	40%
		4	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	15%
13.	Terwujudnya peningkatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1	Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	5%
		2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	9%
		3	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0%
		4	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0,70%
		5	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-
14.	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD)	1	APK PAUD	65%
		2	20% anak usia 4-6 tahun mengikuti program TK/RA	90%
		3	90% TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/ bermain	90%
		4	65% anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat	95%
		5	50% anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD jalur non formal	95%
		6	Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak	48%
		7	Rasio jumlah guru dengan peserta didik PAUD (1:20)	1:10
15.	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar	1	APM SD/MI/Paket A	100,00%
		2	APM SMP/MTs/Paket B	100,00%
		3	APK SD/MI/Paket A	175,50%
		4	APK SMP/MTs/Paket B	100,00%
		5	Angka Rata-rata Lama Sekolah SD/MI	6
		6	Angka Rata-rata Lama Sekolah SMP/MTs	3
		7	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	1,9
		8	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	2,37
		9	Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah	32%
		10	Rasio guru/ murid	1:32
		11	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	1:32:01
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%
		13	Angka Naik Kelas	99%
		14	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	0,05%
		15	Angka lulus SD/ MI	100%
		16	Angka lulus SMP/MTs	98,50%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
		17 Ruang kelas SD/MI sesuai standar	90%
		18 Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar	95%
		19 SD memiliki laboratorium IPA dan komputer	55%
		20 SMP memiliki laboratorium IPA, Bahasa, komputer (ICT)	85%
		21 SD dan SMP memiliki perpustakaan	100%
		22 SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi	100%
		23 SD dan SMP melaksanakan KTSP	100%
		24 SD dan SMP melaksanakan pembinaan kesiswaan dengan baik	100%
		25 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	98,00%
		26 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	90,00%
		27 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100,00%
		28 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100,00%
		29 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	100,00%
		30 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	100,00%
		31 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	100,00%
		32 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap matas pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100,00%
		33 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100,00%
		34 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	100,00%
		35 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	100,00%
		36 Di setiap Kabupaten/Kotasemua Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100,00%
		37 Di setiap Kabupaten/Kotasemua Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100,00%
		38 Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100,00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	
1	2	3	4	
		39	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan	100,00%
		40	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	100,00%
		41	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set untuk ssetiap peserta didik.	100,00%
		42	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup dengan perbandingan satu set untuk ssetiap peserta didik.	100,00%
		43	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	100,00%
		44	Setiap SD/MI memiliki judulbuku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	100,00%
		45	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	100,00%
		46	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :	100,00%
			Kelas I-II : 18 jam per minggu	
			Kelas III : 24 jam per minggu	
			Kelas IV-VI : 27 jam per minggu	
			Kelas VII-IX : 27 jam per minggu	
		47	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100,00%
		48	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100,00%
		49	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100,00%
		50	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	100,00%
		51	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah setiap akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	100,00%
		52	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas pPendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	100,00%
53	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	100,00%		
16.	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah	1	APK SMA/SMK/MA/Paket B	110%
		2	APM SMA/SMK/MA/Paket B	81%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target			
1	2	3	4			
		3	Angka Rata-rata Lama Sekolah SMA/SMK/MA	3		
		4	Angka pendidikan yang ditamatkan	3,28		
		5	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA	88,50%		
		6	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah	100%		
		7	Rasio Guru terhadap murid	1:10		
		8	Rasio Guru per murid per kelas rata-rata	1:10:31		
		9	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	87.364		
		10	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA	90%		
		11	Rasio SMK : SMA = 70 : 30	70:30:00		
				12	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%
				13	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,50%
14	Ruang kelas SMA/SMK sesuai standar			75%		
15	SMA/SMK memiliki Perpustakaan			100%		
16	SMA/SMK memiliki laboratorim			75%		
17	Jumlah rintisan SBI SMK			0		
18	Jumlah rintisan SBI SMA			0		
19	SMA/SMK Menerapkan ICT Based Learning			75%		
20	Nilai Rata-rata UN SMA/SMK/MA			72		
21	SMK Memiliki Bengkel			90%		
22	30 mata pelajaran SMK memiliki buku teks layak menurut BSNP			40%		
23	SMA/SMK melaksanakan KTSP			100%		
24	SMA/SMK Terakreditasi			100%		
25	SMA/ SMK Melaksanakan MBS dengan baik			100%		
26	Jumlah SMA yang menerapkan ISO 9001 – 2000			4		
27	Jumlah SMK yang menerapkan ISO 9001 –2000			5		
28	SMA/SMK Melaksanakan Pembinaan Kesiswaan dengan baik			100%		
29	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO			9		
17.	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal	1	Angka Melek Huruf	98%		
		2	Angka Buta Aksara usia > 45 tahun	2%		
		3	Angka Rata-Rata lama sekolah			
			Dasar	9		
			Menengah	3		
		4	Pendidikan Kesetaraan			
			a. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A	96%		
			b. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B	94%		
			c. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	88%		
		5	Usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	58%		
	Kursus					
6	Persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup	8%				
7	Persentase Lembaga PNF terakreditasi C	3%				
8	Jumlah model layanan PNF unggulan	7%				
9	Persentase dukungan terhadap capaian APK Dikdas	2,60%				
10	Angka pendidikan yang ditamatkan					
	- SD/MI	1,9				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
			- SLTP/MTs	2,37
			- SLTA/SMK/MA	3,67
18.	Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus	1	Pendidikan Khusus Terakreditasi	75%
		2	Persentase APK Pendidikan Khusus	75%
		3	Angka Partisipasi Murni	100%
		4	Angka Naik Kelas	89%
		5	Angka Lulus Pendidikan Khusus	95%
		6	Kelas Sesuai Standar	70%
		7	Persentase Sarana Pendidikan Khusus Terakreditasi	70%
		8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12
19.	Terwujudnya peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	95%
		2	Pendidik yang berkualifikasi dan prasarana pada pendidikan khusus terpenuhi	95%
		3	a. Persentase pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	65%
		4	b. Prosentase pada satuan Pendidikan SD/SDLB/MI	97%
		5	c. Prosentase pada satuan Pendidikan SMP/SMPLB/MTs	100%
		6	d. Prosentase pada satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK	90%
		7	e. Prosentase pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C	60%
			Pendidik bersertifikat pendidik mencapai:	
		8	Prosentase PAUD	40%
		9	Prosentase Satuan Pendidikan SD/SDLB/MI	85%
		10	Pada Satuan Pendidikan SMP/SMPLB/MTs	95%
		11	Pada Satuan Pendidikan SMA/SMALB/MA dan SMK	90%
		12	Prosentase Pengawas TK/RA/SD/SDLB/ MI bersertifikat pengawas	100%
		13	Prosentase Pengawas SMP/MTs bersertifikat pengawas	100%
		14	Prosentase Pengawas SMA/SMK/MA bersertifikat pengawas	100%
		15	Prosentase laboran pada Satuan Pendidikan SMP/MTs bersertifikat laboran	8%
		16	Prosentase laboran pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA bersertifikat laboran.	8%
		17	Prosentase instruktur Kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian	45%
		18	Prosentase pustakawan pada SMP/MTs bersertifikat pustakawan	30%
		19	Prosentase pustakawan pada SMA/SMK/MA bersertifikat pustakawan	33%
		20	Prosentase Pendidik/ Instruktur kursus kejuruan bersertifikat bidang keahlian	45%
20.	Terwujudnya peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan	1	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO	9
		2	Prosentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik	55%
		3	Prosentase SD/MI dan prosentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	98%
		4	Prosentase SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik	98%
21.	Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat	1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.109
		2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	56.834
		3	Jumlah Perpustakaan	229
			- Perpustakaan Sekolah	211
			- Perpustakaan Kelurahan	17

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
		- Desa Buku	1
		- Perpustakaan Kota	1
22.	Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan	1 Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa	100%
		2 Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan	3,8
		3 Jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan meningkat	7
		4 Prosentase sekolah melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan	98%
23.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah	1 Jumlah kegiatan kepemudaan	16
		2 Jumlah organisasi pemuda	29
		3 Tersedianya 5 program kepemudaan oleh lembaga kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pemuda di bidang kewirausahaan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kebudayaan dan, pendidikan	4 program 16 keg
		4 Partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan meningkat 5 persen setiap tahun	8 KUPP, 14 okp murni, 5 OKP turunan parpol, 14 org
		5 Angka pengangguran pemuda menurun 5 persen setiap tahun	9
		6 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan dan pemuda dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah	1
		7 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan dan pemuda disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat	1
24.	Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu	1 Jumlah klub olah raga	164
		2 Jumlah organisasi olah raga	33
		3 Jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan	25
		4 Jumlah gedung olah raga	36
		5 Rasio Lapangan Olahraga dalam kondisi baik	95%
		6 Terpilihnya juara kompetisi olahraga antar kelurahan	3 cabang (12 juara)
		7 Terlaksananya kejuaraan tenis lapangan antar klub	2 kali
		8 Jumlah prestasi olah raga dalam even karesidenan	142
		9 Jumlah prestasi olah raga dalam even propinsi	115
		10 Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional	46
		11 Jumlah atlet yang dikirim pada lomba tingkat provinsi	232
		12 15 Klub Olahraga Pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota	15
		13 Satu lapangan terbuka dapat digunakan 5 sekolah	2
		14 7 cabang olahraga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali	14

MISI 6:

Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman ketentraman masyarakat

1.	Terwujudnya peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat	1 Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	3 kali
		2 Jumlah konflik bernuansa SARA	0 konflik
2.	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah	1 Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	1 kali
3.	Terwujudnya peningkatan pembinaan politik daerah	1 Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah)	74,67%
		2 Tingkat pelanggaran dalam pemilu	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Target
1	2	3		4
4.	Terwujudnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional	16 ormas
5.	Terwujudnya masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama	1	Frekuensi koordinasi FKUB dan dialog antar umat agama	3 keg.
6.	Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	1	Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4
		2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	83,85
		3	Petugas Linmas di Kota	916
		4	Jumlah Pos Kamling aktif per jumlah Kelurahan	13
		5	Penegakan Perda dan Peraturan KDH yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	5
7.	Terwujudnya peningkatan profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, Satpol PP	1	Jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/kamtibmas/SAR/Satpol PP	100 orang
8.	Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana	1	Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana	90 orang
		2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	1 mobil : 21.000
		3	Frekuensi sosialisasi dan pelatihan menghadapi resiko bencana	3
		4	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (Response Time Rate)	100%

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO